

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

20200386

No. Panggil :

A KSK 123

# KPK TANGKAP BUPATI KUANTAN SINGINGI

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Andi Putra dalam kasus suap perpanjangan izin perkebunan, Senin, 18 Oktober lalu. Ia diduga menerima janji suap Rp 2 miliar dari General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

"Terjadi kesepakatan antara AP dan SDR dengan pemberian uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa, 19 Oktober lalu. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menahan delapan orang, di antaranya ajudan Andi Putra dan pihak swasta.

PT Adimulia Agrolestari memohon perpanjangan izin kepada Bupati Andi. Ia diduga telah menerima Rp 700 juta. Andi menolak berkomentar setelah diperiksa KPK. "Enggak," ujarnya. Sedangkan Sudarso tak berbicara sedikit pun.



Bupati Kuantan Singingi Andi Putra memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 20 Oktober 2021.

18 Oktober 2021

19 Oktober 2021

# KAPOLDA BERJANJI USUT PEMERKOSAAN DI PARIGI

KEPALA Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi berjanji menuntaskan kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan bekas Kepala Kepolisian Sektor Parigi, Inspektur Satu I Dewa Gede Nurate. "Kami datang rumah korban, meyakinkan bahwa kami akan profesional menangani anggota yang salah," kata Rudy, Selasa, 19 Oktober lalu.

I Dewa Gede Nurate diduga bertindak



I Dewa Gede Nurate.

asusila terhadap putri seorang tahanan. Ia disebut berjanji membebaskan tahanan itu jika putri si tahanan bersedia bersetubuh dengannya. Namun janji itu tidak terwujud.

Kuasa hukum korban, Andi Akbar Panguriseng, mengatakan kliennya mengalami guncangan psikis akibat peristiwa tersebut. Ia meminta pelaku dijatuhi hukuman setimpal. "Kami tidak akan menempuh jalan damai," ujarnya.

Kuantan 4x



Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, 21 Oktober 2021.

# RAPOR MERAH JOKOWI-MA'RUF

**K**ELOMPOK masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia menilai kebebasan berpendapat kian merosot dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, mengatakan setidaknya ada 360 pelanggaran kebebasan berekspresi pada Oktober 2019-Oktober 2021. "Pelanggarannya seputar pembubaran paksa yang diikuti penangkapan sewenang-wenang," katanya, Selasa, 19 Oktober lalu.

Amnesty International Indonesia juga mencatat ada 43 insiden kekerasan oleh polisi dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 6 Oktober dan 10 November 2020. Amnesty juga melaporkan setidaknya ada 402 korban kekerasan dalam aksi protes di 15 provinsi itu.

Rivanlee menilai kebebasan akademis di kampus pun kian rontok setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik pada